BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ekonomi adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari hari,istilah ekonomi mula – mula berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikonomia* yang berasal dari 2 suku kata yaitu *Oikos* yang berarti rumah tangga dan *Nomos* yang berarti aturan. Perubahan kata *oikonomia* menjadi kata ekonomi mengandung arti : aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Dalam hal ini pengertian rumah tangga dapat meliputi badan usaha,pemerintahan Negara,dan lainnya yang masih berhubungan. Selanjutnya ekonomi dapat diartikan sebagai persoalan yang berhubungan dengan daya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari,maka dari bahwa persoalan ekonomi tidak bias dilepaskan dari Pemerintah sebagai pengatur dan pelindung kehidupan ekonomi.

Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang didasarkan pada asas desentralisasi atau lebih dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan secara pribadi,peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi ,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperkuat Pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya.

Reformasi yang dimulai terjadi beberapa tahun yang lalu di negara kita telah merambah hampir keseluruh aspek kehidupan khususnya Ekonomi. Salah satu aspek yang dominan adalah aspek pemerintah. Aspek yang dimaksudkan disini adalah aspek hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pada aspek ini mencuat isu adanya tuntutan otonomi (hak yang mengatur sendiri) yang lebih luas dan nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah yang sedang bergulir saat ini sebagai bagian dari adanya reformasi atas kehidupan bangsa. Dan oleh pemerintah pusat telah ditampung dalam UU No.22/1999 tentang pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu entitas pelaporan yang wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan,kemudian pada bagian akuntansi pelaporan juga harus dapat menyelenggarakan akuntansi secara tepat dan akurat.

Didalam semua kegiatan diharuskan adanya Sistem Informasi yang baik dan memberikan nilai tambah terhadap proses produksi,kualitas,manajemen pengambilan keputusan dan pemecahan masalah serta keunggulan kompetitif yang tentu saja sangat berguna bagi kegiatan bisnis. Perencanaan ,pengerjaan dan pengendalian dalam sebuah sub sistem memiliki kaitan yang erat. Untuk melakukan segala sesuatu tentunya pasti ada prosedurnya yang artinya suatu urutan kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam kepada transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan maupun instansi.

Untuk mencairkan dana dari SP2D maka dinas yang membutuhkan harus memenuhi prosedur terlebih dahulu mulai dari prosedur pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), dan sampai pada pelaksanaannya.

SP2D sendiri mempunyai berbagai cara pengujian apakah SP2D itu benar-benar akan digunakan sebagai anggaran belanja atau tidak sama sekali, maka di sinilah BUD di daerahnya masing – masing harus betul-betul mengorek kebenaran dan keabsahan para pemimpin/pejabat Dinas yang mengirim/menagih SPM ke BUD. SP2D sendiri dapat diterbitkan jika :

1. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi anggaran yang tersedia.
2. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu untuk pencairan SP2D ada juga waktu pelaksanaannya,yaitu :

1. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima.
2. Apabila ditolak ,dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterimanya SPM.

Di dalam pelaksanaannya para pegawai sering mendapatkan masalah dan pada ujungnya penginputan data pun tidak berjalan dengan lancar di karenakan terjadinya kerusakan pada sistem yang di pakai atau juga bisa terjadi akibat keterlambatan dari proses SP2D itu sendiri.

Selain faktor tadi,para pegawainya pun kurang memenuhi kompetensi di bidang sistem keuangan,dan hal yang demikian pula proses pencairan dana pun bisa saja terhambat karena proses penanganannya yang tidak cepat.

Terdapat fenomena di dalam pelaksanaan SP2D yaitu,tidak semua SP2D dapat dicairkan karena adanya masalah di dalam hal ini,yaitu setiap SP2D yang sudah terbit belum tentu bisa dicairkan karena adanya suatu kendala atau karena juga kegiatannya dirasa tidak perlu dan tidak terlalu penting untuk kelangsungan dinas tersebut,ataupun misalnya untuk pembelian barang yang mengalami kenaikan harga,di sini pemerintah daerah lebih baik membatalkan semua kegiatan tersebut dari pada harus mencairkan SP2D untuk sesuatu hal yang tidak maksimal manfaat dan kualitasnya,hal ini sering terjadi terutama pada akhir tahun yaitu pada tanggal 31 Desember,disamping itu semua keterlambatan dalam penanganan proses pencairan dana juga sering terjadi dan mengakibatkan kesalah pahaman di akhir pelaporan nanti. .(*sumber:Pemprov Jabar Tahun 2010*)

Kemudian selain itu juga sering terjadi salah pencatatan,hal ini bisa dilihat dari contoh di bawah ini :

Di lembaran Surat Perintah Membayar (SPM):

No. Rekening	**Uraian**
1.14.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Anak

Tetapi di Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertulis :

No. Rekening	**Uraian**
1.14.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan

Hal ini sering terjadi dalam pencatatan di dalam SP2D yang pada akhirnya akan menjadi masalah,dan apabila hal ini terjadi pengguna anggaran harus

melapor dan merubah SP2D ini kepada Kepala Bagian Bendahara di Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang nantinya akan diperbaiki dengan Nota Dinas.Nota Dinas itu sendiri adalah surat pembetulan nomor rekening yang salah di dalam SP2D.

Setelah pengguna anggaran melapor kepada Kabag Bendahara Pusat maka Kabag Bendahara Pusat akan memperbaiki kesalahan pencatatan tersebut,hal ini lah yang dinamakan dengan Nota Dinas.

Di lembaran SPM dan SP2D di keduanya harus sama dan sesuai dengan No.Rekening maupun Uraiannnya,karena kalau tidak sama akan menimbulkan rekonsiliasi dan pelaporan yang tidak sesuai dengan pengajuan yang di ajukan sebelumnnya,oleh karena itu setiap ada lembaran yang salah dalam pencatatan maka akan langsung dihancurkan oleh mesin penghancur kertas. Di bawah ini adalah contoh lembaran SP2D yang sudah di perbaiki dan sama dengan SPM.

Di lembaran Surat Perintah Membayar (SPM):

No. Rekening	**Uraian**
1.14.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Anak

Di lembaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D):

No. Rekening	**Uraian**
1.14.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Anak

Kemudian sering adanya penyimpangan sewaktu pelaksanaan para pengguna anggaran selalu meminta lebih dana anggaran kepada pemerintah pusat dengan alas an tertentu,tetapi pemerintah pusat sudah menetapkan dana anggaran

yang di peruntukan untuk tiap dinas – dinas tersebut,hal ini sering di langgar pada SPP dan juga SPM.

Fenomena atau masalah ini di dapatkan oleh penulis secara langsung dengan melakukan wawancara dan tanya jawab dengan Ibu Dra.Hj.Silviaty M,si selaku Kepala Bagian dan Bapak Dindin Mahpudin SE.,M.AK,Ak sebagai ketua pelaksana kegiatan di Akuntansi Pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku orang yang yang bertanggung jawab di bagian tersebut untuk mendapatkan informasi yang benar – benar terjadi.

Apabila SP2D yang di-*return*/ditolak oleh Bank Penerima yaitu Bank Jabar (Bank yang telah secara resmi dipercaya oleh Pemerintahan Jawa Barat untuk menyimpan semua harta yang dimiliki Pemprov Jabar) ditindaklanjuti oleh KPPN dengan pemberitahuan kepada satuan kerja supaya ada perbaikan/ralat nama/rekening pada pihak penerima, namun apabila dalam waktu tujuh hari kerja belum ditindaklanjuti oleh satker, maka uang return SP2D tersebut akan disetor kembali ke rekening kas negara sehingga penyelesaiannya tidak cukup dengan surat ralat yang dilampirkan , namun prosesnya diatur tersendiri.

Berdasarkan fenomena tersebut,penulis tertarik untuk mengambil laporan yang berjudul **“ TINJAUAN ATAS PROSEDUR DAN PELAKSANAAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PADA BAGIAN AKUNTANSI PELAPORAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT ”**. Laporan ini menyajikan hasil pengamatan dan pengalaman yang didapat selama melakukan penelitian di bagian Akuntansi Pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang,peneliti mengidentifikasi masalah yang benar – benar terjadi di tempat penulis melakukan penelitian yaitu di Pemprov Jabar bagian Akuntansi dan Pelaporan :

1. Sistem penginputan data yang tidak berjalan lancar.
2. Pegawai yang kurang memenuhi kompetensi di bidang sistem keuangan.
3. Prosedur dan pelaksanaannya belum sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan di Pemprov Jabar.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dalam Penelitian ini penulis memilih topik prosedur penatausahaan dan Pelaksanaan SP2D pada Pemprov Jabar bagian Akuntansi dan Pelaporan,karena menurut penulis ini merupakan salah satu hal yang menarik dan masih merasa asing mendengar,dan maka dari itu penulis ingin mempelajarinya lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah di uraikan ,maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah,yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan tentang SP2D pada Pemprov Jabar bagian Akuntansi dan Pelaporan.
2. Hambatan atau masalah prosedur dan pelaksanaan tentang SP2D pada Pemprov Jabar bagian Akuntansi dan Pelaporan.
3. Bagaimana upaya atau cara memecahkan masalah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan di dalam prosedur dan pelaksanaan SP2D pada Pemprov Jabar bagian Akuntansi dan Pelaporan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini dalam hal pelaksanaan SP2D,di bagian Akuntansi dan Pelaporan Pemprov Jabar terdapat tata cara yang sudah ditetapkan,demi kelancaran dalam kegiatan pelaksanaanya.Sehingga demi kelancaran inilah terdapat maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan.

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis dengan melakukan penelitian ini adalah penulis ingin bermaksud untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) di Pemprov Jabar bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Serta untuk mengumpulkan data dan mencari tahu sebanyak mungkin tentang SP2D seperti prosedur cara pelaksanaan, siapa dan kapan waktu untuk melakukan pencairan dana,dan informasi yang sesuai dengan topik yang akan penulis bahas.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan untuk tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dengan mengadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan tentang SP2D pada Pemprov Jabar bagian Akuntansi dan Pelaporan.
2. Untuk mengetahui masalah prosedur dan pelaksanaan tentang SP2D pada Pemprov Jabar bagian Akuntansi dan Pelaporan.
3. Untuk mengetahui upaya atau cara memecahkan masalah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan di dalam prosedur dan pelaksanaan SP2D pada Pemprov Jabar bagian Akuntansi dan Pelaporan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi bagi penulis,instansi Pemerintahan yang diteliti, juga semua orang yang membacanya,Kegunaan Penelitian ini di bedakan menjadi 2 yaitu :

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Pengembangan Ilmu

   Memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi ilmu akuntansi tentang proses pelaksanaan SP2D di bagian Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2. Penulis

   Laporan penelitian ini berguna bagi penulis untuk menambah wawasan,serta penulis dapat memperoleh pengalaman di dunia kerja sebagai studi banding dari apa yang di dapat selama perkuliahan dengan penelitian ini,juga mengembangkan mental dan budaya kerja serta sebagai langkah evaluasi diri si penulis.

   Dan khususnya penulis dapat lebih memahami apa itu SP2D secara luas,dan juga apabila nanti penulis bekerja di instansi tersebut penulis tidak merasa asing lagi dengan apa yang di maksud SP2D,dan penulis juga dapat mengentry data mengenai SP2D.

3. Pihak Lain

   Diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan referensi mengenai proses pelaksanaan SP2D di bagian Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Instansi Pemerintahan

   Untuk di instansi sendiri mungkin dengan adanya penulis mulanya sedikit membuat tidak nyaman para pegawai instansi karena harus bolak – balik dan memonitor cara kerja penulis agar tidak keliru,tetapi setelah penulis cukup paham dengan apa yang dimaksud dengan SP2D mereka para pegawai merasa terbantu sehingga beban pekerjaan mereka lebih sedikit santai dan fokus, khususnya untuk para pegawai di bagian Akuntansi Pelaporan di Pemprov Jabar seperti membantu mengumpulkan dan mengkoreksi serta mengentry data pada transaksi keuangan seperti SP2D,Mengetik lembar pengesahan yang disusun berdasarkan program dan kegiatan serta tanggal transaksinya.

2. Untuk Karyawan

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerjanya ke arah yang lebih maju.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini penulis mengambil lokasi yang dilakukan di Kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Gedung Sate) di bagian Akuntansi Pelaporan Jl. Diponegoro no.22 Bandung 40115,Telp (022) 4232448 – 4233347 – 423096.

Tabel 1.1

Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Keterangan	Bulan																											
		Februari 2011				Maret 2011				April 2011				Mei 2011				Juni 2011				Juli 2011				Agustus 2011			
1.	Penyusunan proposal																												
2	Pengumpulan proposal																												
3	Pemeriksaan proposal																												
4	Bimbingan																												
5	Pendaftaran sidang																												
6	Pelaksanaan sidang																												
7	Revisi TA																												